

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Indonesiaa juga kaya akan sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Di era otonomi saat ini, daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Kebijakan otonomi tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia guna mencapai kesejahteraan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya akan berdampak kepada masyarakat dan juga berguna mengurangi pengangguran desa. Pembangunan ekonomi di desa menjadi penting karena sebagian besar masyarakat yang hidup di desa berada digaris kemiskinan.

Sebagai daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya, maka Desa harus bisa berkembang dan mampu mengembangkan desa. Meski sekarang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (2) dan ayat (4) tentang Desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya akan tetapi Desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan juga bisa mengembangkan usaha yang ada di desa agar bisa berkembang dengan usahanya tersebut. Penghasilan yang didapat dari desa bisa disimpan melalui keuangan desa atau kas desa agar dapat mengelola pendapatan desa dengan baik.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah di kelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang sangat kecil. Sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu dalam segi infrastruktur maupun segi administrasi. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa agar desa memiliki PADes (Pendapatan Asli Desa) yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mengelola potensi yang ada yaitu dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turut serta langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pasal 3 menyebutkan “ selain untuk mengelola aset, potensi dan sumber daya setempat, BUMDes ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan untuk mengembangkan potensi perekonomian wilayah pedesaan guna mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan serta menciptakan lapangan pekerjaan”.

BUMDes menurut (Maryunani, 2008) “BUMDes adalah lembaga suatu Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangungun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pendaftaran, Pendataan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan , dan Pengelolaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa atau Badan usaha Milik Desa Bersama pasal 1 ayat (1) menyatakan “ Badan Usaha Milik Desa Yang disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Kabupaten Cirebon sendiri sudah banyak desa yang mempunyai program BUMDes yang berjalan dengan cukup baik dengan pendapatan yang bisa membantu untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Cirebon juga peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu menggerakkan ekonomi desanya secara optimal, seperti masih rendahnya inisistif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi desa.

Desa Gebang Kulon salah satu desa di Kabaupaten Cirebon yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah berjalan kurang lebih sudah tiga tahun dan memiliki beberapa usaha seperti minimarket, jaringan wifi, dan café yang berjalan cukup baik, akan tetapi setelah datang Pandemi Covid-19 BUMDes desa Gebang Kulon mengalami permasalahan modal karena berkurangnya konsumen salah satu usahanya yaitu minimarket sehingga membuat pemasukannya berkurang.

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi tersebut di atas mengidentifikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan Program BUMDes di Desa Gebang Kulon. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah berupa Implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon belum terlaksana secara optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Gebang kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program BUMDes?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon untuk mengatasi hambatan yang dihadapi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Program BUMDes.

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk mengetahui hambatan tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik.
2. Hasil dari penelitian guna untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah, apakah dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan keputusan yang di buat oleh pemerintah.

1.5.2 Secara Praktis

1. Bagi kantor Kuwu Desa Gebang Kulon, dapat dijadikan sumbangan pikiran dengan harapan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dijalankan dengan optimal.
2. Dijadikan sebagai sumber informasi untuk masyarakat mengenai Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberdayakan masyarakat Desa dan menambah penghasilan Desa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Implementasi Kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politik karena wujudnya intervensi berbagai macam kepentingan.

Van Metter dan Van Horn Mendefinisikan implementasi kebijakan (dalam Leo Agustino 2020:146) sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, penulis menggunakan teori dari George C. Edward III (dalam Leo Agustino 2020:154), karna ada kesesuaian anatar masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan oleh teori tersebut.

Dalam pendekatan yang diteorakan oleh George C. Edward III (2020:154), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

Variable pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III (2020:154), adalah komunikasi.

Komunikasi menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di komunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus akurat, tepat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat di pakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya miskomunikasi, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi

implmentasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai dengan kebijakan.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Bila perintah yang diberikan sering kali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya wacana atau tulisan saja.

Indikator sumber daya menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino 2020 : 155, terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf atau sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak mencukupi, diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksana kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implmentor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggalkan proses implementasi kebijakan. Tetqpi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal itu ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik merupakan hal terpenting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, yang mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variable yang ketiga adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III (2020:157) adalah:

- a. Efek Disposisi; sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Merujuk pada penunjukan dan

pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan public yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil

- c. Insentif; untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Variabel yang keempat adalah struktur birokrasi, walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

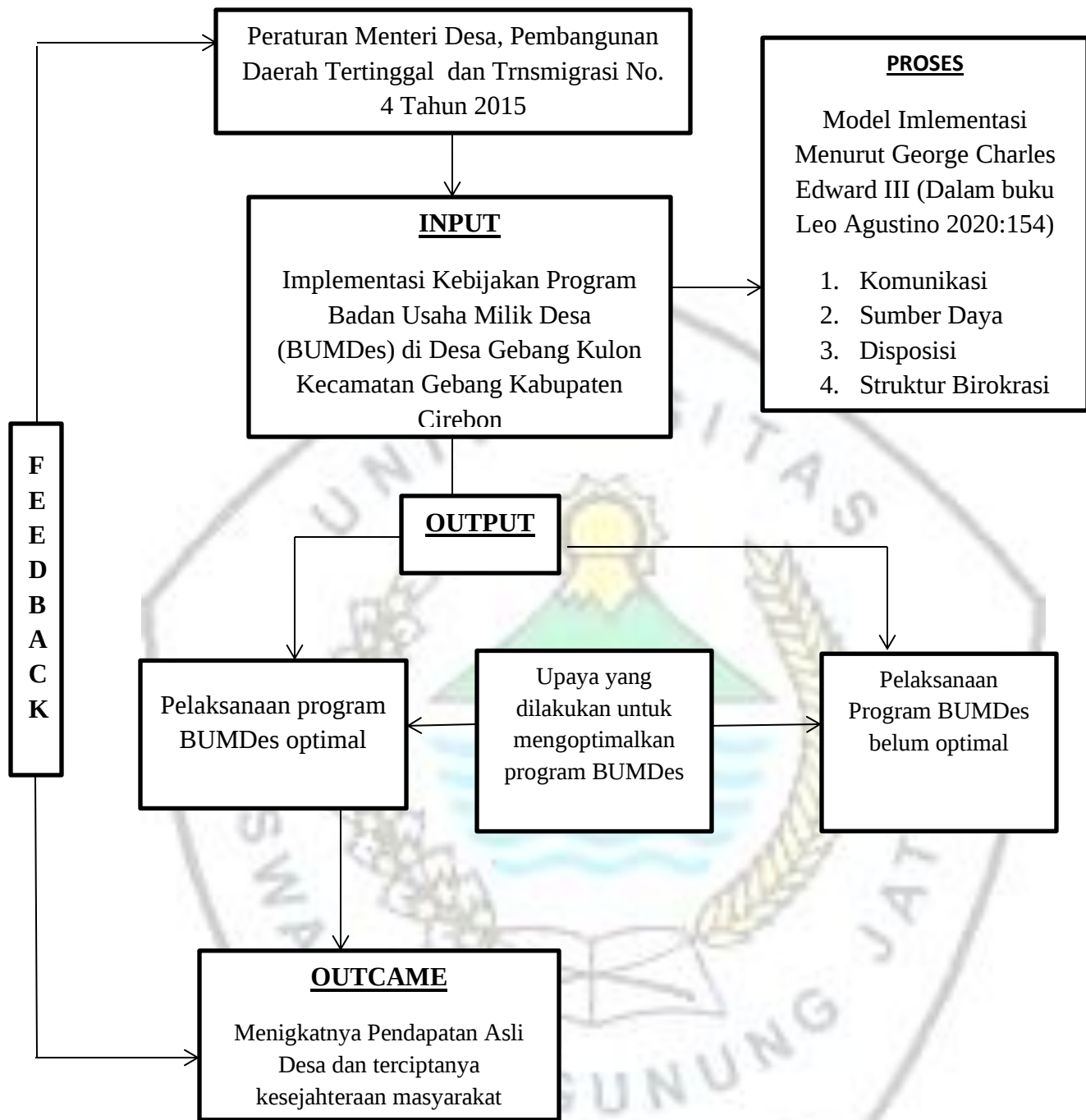
Ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

- a. Membuat *Standar Operasional Prosedur* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin

yang memungkinkan para pegawai seperti aparatur, administratur, atau birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

- b. Melaksanakan fragmentasi; tuuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan fragmenrtasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III di atau diharapkan semua program dilakukan secara optimal dan menyeluruh sehingga bisa mendapatkan program berkualitas. Oleh karena itu Implementasi Kebijakan haru dilakukan secara totalitas bagi seluruh pegawai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan focus penelitian yang di operasionalkan melalui indicator sebagai berikut:

- 1) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. (Ripley & Franklin (1982:4) dalam Budi Winarno 2012:148).
- 2) Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. (Eulau & Prewitt (1973:465) dalam Leo Agustino 2020:15).
- 3) Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering

disebut *resource*. (Jones (1980) dalam Muhammad Ridho Suaib 2016:82).

- 4) Program adalah kata, ekspresi atau pernyataan yang disusun dan diangkat menjadi satu kesatuan prosedur berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang di implmentasikan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.
- 5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar kepada ragam potensi yang dimiliki desa.
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Menegaskan bahwa badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Operasional konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan terori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator .

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijabarkan ke dalam parameter indikator seperti tertera dalam table sebagai berikut:

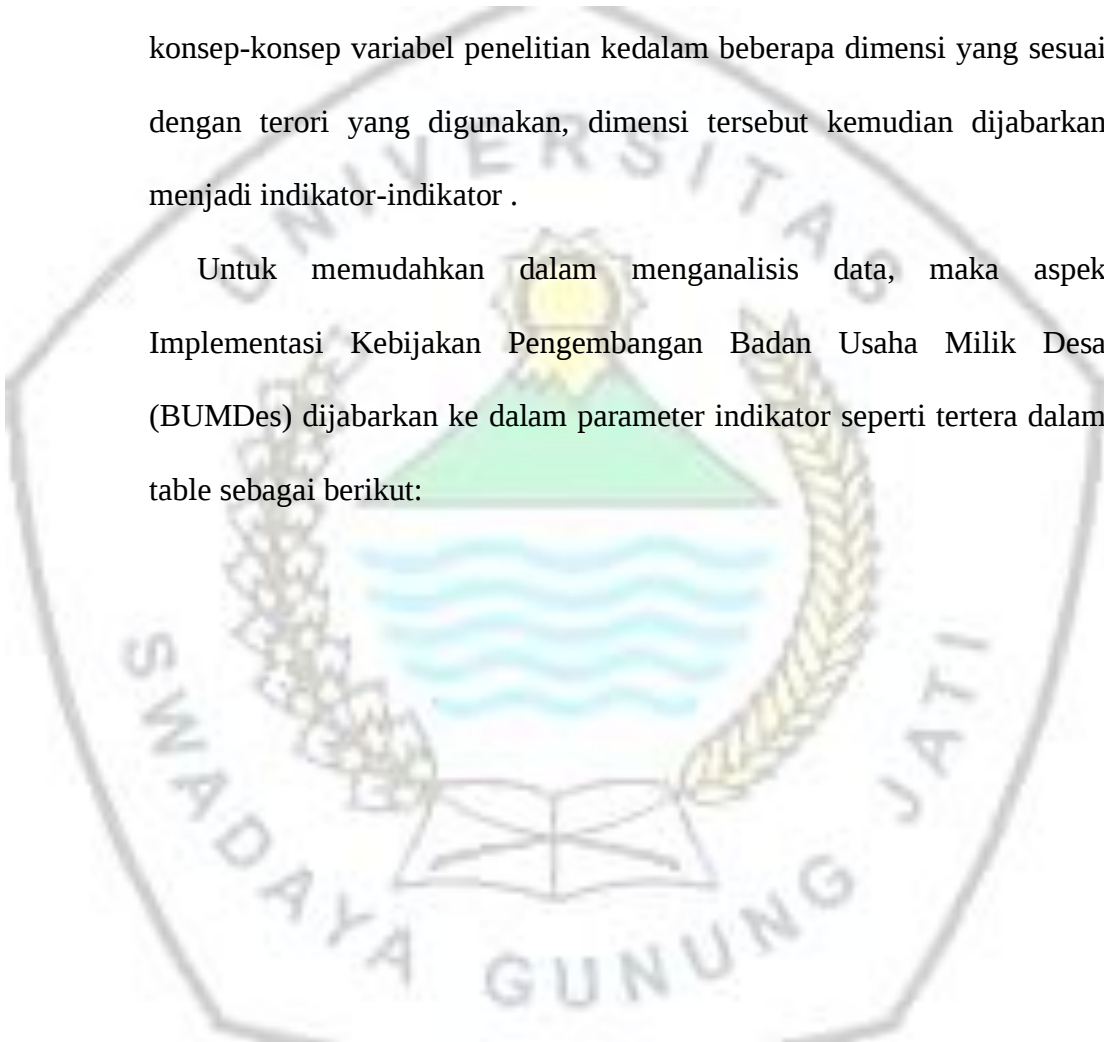


Table 1.1

Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2020:154-158)	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Efek Disposisi b. Melakukan Pengaturan Birokrasi c. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Membuat SOP b. Melakukan Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode Deskriptif Kualitatif penelitian ini terhadap permasalahan yang sedang terjadi dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2019:8) merupakan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, pengambilan sumber data atau teknik pengumpulan data bersifat triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, yang menjadi instrument utamanya adalah peneliti sendiri, penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon selain berpedoman pada teori-

teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori-teori dengan kenyataan di lapangan yang ada.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) informan adalah orang yang memberikan informasi dan orang yang merupakan sumber data dalam penelitian. Teknik pemilihan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisa dalam penelitian ini.

Pertimbangan orang-orang sebagai informan pada penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Kepala Desa Gebang Kulon, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gebang Kulon, Masyarakat. Dengan alasan penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Informan peneliti ini terdiri dari :

1. *Key Informan* (Informan Kunci)

Informan kunci adalah informan yang menguasai tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

1. Kuwu/Kepala Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon

2. Informan Pendukung

Informan Pendukung ialah orang-orang diluar informan yang dapat memberikan informasi lengkap atau informasi tambahan yaitu :

1. Ketua Badan Usaha Milik Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
2. Masyarakat

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari dan menelaah berbagai sumber bacaan seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah masalah yang sedang dibahas.

2. Studi lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik diantaranya:

- a. Observasi atau pengamatan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki dimana observasi langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian, pelaksanaannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi dan adapun sistem yang dipilih dan ditetapkan pada observasi langsung adalah dimana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenuhnya dari obyek yang sedang diteliti.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan para informan, wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan dengan cara mendalam (depth interview). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap sehingga peneliti melakukan analisis dengan tujuan dan mendalam.

- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumentasi yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada yang berkepentingan.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh penyusun sebagai referensi dan bahan acuan penelitian, seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang dibutuhkan penulis.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moelong (2016:330), teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, diluar itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Penulis dengan menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara check, recheck dan crosscheck terhadap data itu.

Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian kualitatif, suatu data dikatakan abash akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ada kesamaan data dari hasil dengan para informan, data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data

atas jawaban yang sama dari informan, jika jawaban informan berbeda-beda maka data itu belum akurat/absah. Peneliti harus melakukan triangulasi dengan cara check, rescheck, cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

- b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan jika data hasil wawancara dengan pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak absah atau akurat. Peneliti harus melakukan triangulasi lagi dengan cara check, rescheck, cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam, data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moloeng 2017:280).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data Merupakan data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal

yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data adalah memilih dan memilah data yang diperoleh, data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

2. Display Data

ialah menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel dan sebagainya, dalam display data ini hanya data yang relevan dengan pasti dan masalah penelitian yang dijadikan.

3. Verifikasi Data

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan permasalahan terhadap hal-hal yang sering muncul.

4. Penarikan Kesimpulan

Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi diatas.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya masalah mengenai Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh
3. Letak lokasi sangat terjangkau oleh penulis dalam proses penyusunan proposal.

1.9.2 Rencana Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2022, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :

